
DETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) DI SEKTOR PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD DI KABUPATEN JEMBER)

Taufik Kurrohman¹, Ekaning Pratiwi², Andriana³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: taufik.fe@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan mengenai pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, kepuasan kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan dan penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode survei. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian ini sejumlah 223 pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh negatif antara kultur organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Kata Kunci: Persepsi Pegawai, Kecurangan (*Fraud*), Sektor Pemerintahan.

Abstract

This study aims to explore the perceptions of employees in government agencies regarding the effect of the effectiveness of internal control systems, compensation satisfaction, organizational culture, unethical behavior, leadership style, and law enforcement against fraud in the government sector. This study included a quantitative research with survey method. The data used is primary data collected through questionnaires. The research sample of 223 employees a number of government agencies in Jember. The results of this study indicate that there is a negative influence between the effectiveness of the internal control system to fraud in government sector, there is a negative effect between satisfaction and compensation to fraud in the government sector, there are no negative effects between the culture of the organization to fraud in the government sector, there are positive influence between behavior ethical against fraud in the government sector, there is a negative influence of leadership style to fraud in the government sector, there are no negative effects of enforcement against fraud in the government sector.

Key words: *Perceptions of Employees, Fraud, Government Sector.*

Pendahuluan

Fraud adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*).

Menurut Sukanto (2009), *fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Penelitian kali ini menggunakan teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yang terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalitas (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Pada penelitian ini, peneliti memproksikan suatu tekanan karena gaya kepemimpinan dan kepuasan kompensasi.

Peluang (*opportunity*) adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Biasanya disebabkan karena pengawasan internal (*internal control*) suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keefektifan sistem pengendalian internal sebagai suatu peluang bagi pemerintahan atas terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Pada penelitian ini, peneliti memproksikan rasionalisasi dengan variabel perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, kultur organisasi dan penegakan hukum.

Pemerintahan sebagai pengembalian kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara terkelola dengan baik dan akuntabel. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik *fraud*

yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari keefektifan sistem pengendalian internal, kepuasan kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinandan penegakan hukum.

Pengembangan Hipotesis

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Dalam penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan *fraud* di sektor pemerintahan. Artinya semakin efektif sistem pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian lain Wilopo (2008) menunjukkan bahwa secara partial pengendalian intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi *fraud*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh keefektifansistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*), dengan didukung pernyataan bahwa semakin baik pengendalian internal organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan, dan semakin tinggi kepatuhan pengendalian intern maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan.

H1: Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Kepuasan Kompensasi

Pada penelitian yang dilakukan Meliana (2009), bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi jumlah kompensasi yang diberikan oleh prinsipal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:133) dalam

Pramudita (2013), mengatakan bahwa suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut.

H2: Kepuasan kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Kultur Organisasi

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2007), mengatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Hasil analisis ini mendukung pernyataan Arifin (2000) bahwa kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

H3: Kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Perilaku Tidak Etis

Menurut Tang *et al.* (2003) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Pada penelitian Mustika, Hastuti dan Heriningsih (2016) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi perilaku tidak etis, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan. Artinya dengan adanya perilaku tidak etis akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

H4: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) sektor pemerintahan.

Gaya Kepemimpinan

Menurut COSO (2004) dalam Pramudita (2013), mengatakan lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya *top* manajemen. Pada penelitian Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan Kota Surakarta termasuk dalam kategori baik, kecuali indikator relasi pemimpin dan etika pemimpin. Artinya dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik maka akan mengurangi terjadinya kecurangan di sektor pemerintah.

H5: Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegak penegakan hukum dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah. Pada penelitian Pramudita (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut berarti semakin baik penegakan hukum di daerah tersebut maka akan mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah.

H6: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan ke pegawai tetap atau pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas se-Kabupaten Jember yang bekerja di bagian keuangan di setiap SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diolah menggunakan alat analisis berupa *software SPSS*

versi 22 untuk menemukan hasil dari masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap atau pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas se-Kabupaten Jember. Pertimbangan peneliti dalam pengambilan sampel adalah sampel minimumnya 30 subjek. Pertimbangan tersebut berdasarkan jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian korelasional. Sehingga jumlah sampel adalah lebih dari 30 pegawai. Kuesioner yang akan diolah adalah kuesioner yang kembali dalam keadaan tidak rusak.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Variabel Endogen)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan.

Variabel Independen (Variabel Eksogen)

Keefektifan sistem pengendalian internal adalah persepsi karyawan mengenai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kepuasan kompensasi adalah persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka.

Kultur organisasi merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dan akan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.

Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan

kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*) (Tang, et all 2003 dalam Wilopo 2006).

Gaya kepemimpinan adalah persepsi karyawan mengenai seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi orang atau bawahan sehingga mereka akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei, yaitu dengan pengiriman atau penyebaran kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan dengan tanda ceklis pada jawaban yang disediakan. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5 dengan rincian sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (STS) sampai (5) sangat setuju (SS).

Teknik Penyajian dan Analisis Data

Metode Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data antara lain:

Uji Validitas.

Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Konstruk dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* > 0,5 dan signifikansi < 0,05.

Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha*. Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha (α) > 0,6 maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memenuhi kualifikasi *best linear unbiased estimator* maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji untuk kualitas data yaitu: Uji

Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan model penelitian di atas maka persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Fraud

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

X2 = Kepuasan Kompensasi

X3 = Kultur Organisasi

X4 = Perilaku Tidak Etis

X5 = Gaya Kepemimpinan

X6 = Penegakan Hukum

e = Kesalahan regresi (*error*)

Sementara untuk uji analisis data akan dilakukan: dilakukan Uji Regresi Linier Berganda, Uji

Model, Koefisien Determinasi (R^2), Uji t

Hasil Penelitian

Analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 223 responden. Dari statistik deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel berada pada nilai rata-rata yang berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju dari item-item pertanyaan yang peneliti ajukan. Dapat dilihat dari salah satu variabel yaitu variabel X1 (Keefektifan Sistem Pengendalian Internal) yang merupakan hasil olahan variabel akuntabilitas dari 5 pertanyaan yang valid dari 223 responden yang menghasilkan total jawaban minimum responden sebesar 5, total jawaban maksimum sebesar 25 dan rata-rata jawaban responden sebesar 20. Rata-rata jawaban responden sebesar 20, hasil tersebut termasuk dalam kategori efektif.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	223	5	25	20,00	3,66
X2	223	5	25	19,05	4,24
X3	223	5	25	18,75	3,50
X4	223	5	25	9,99	4,32
X5	223	5	25	19,25	3,73
X6	223	5	25	18,67	2,94
Y	223	9	45	17,71	8,24
Valid N (listwise)	223				

Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda Fraud di sektor pemerintahan di Kabupaten Jember

Model	Unstandardized Coefficients		Stand	T	Sig.
	B	Std. Error	Coeff		
	(Constant)	26.860	4.026		
X1	-.749	.241	-.334	-3.105	.002
X2	-.165	.214	-.085	-.769	.443
X3	.434	.240	.185	1.813	.071
X4	.688	.118	.361	5.856	.000
X5	-.336	.204	-.152	-1.645	.101
X6	.022	.205	.008	.109	.914

Hasil analisis pada tabel regresi di atas menunjukkan bahwa variabel Kultur Organisasi (X3) dan Penegakan Hukum (X6) dengan nilai koefisien 0,434 dan 0,022 dan nilai signifikansinya masing-masing adalah 0,071 dan 0,914 lebih besar dari 0,05. Secara statistik dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Dengan demikian kedua hipotesis tersebut ditolak. Sedangkan hipotesis lainnya diterima.

Pembahasan

Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal (X1) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar

-0,334 dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan instansi pemerintahan di Kabupaten Jember memiliki lingkungan pengendalian, kepatuhan dalam manajemen risiko, kepatuhan dalam informasi dan komunikasi serta kepatuhan dalam pemantauan dan monitoring.

Terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kompensasi (X2) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar -0,085 dan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,443 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H2 dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan pegawai di instansi Kabupaten Jember sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dalam lampirannya memuat Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan masa kerja.

Tidak terdapat pengaruh negatif antara kultur organisasi (X3) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,185 dan nilai signifikan sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Jember kurang memiliki *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis (X4) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,361 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H4 diterima. Hal tersebut berarti para pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Jember telah dapat menghindari perilaku-perilaku tidak etis seperti menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan sumber daya organisasi, menyalahgunakan kekuasaan, tidak berbuat apa-apa serta mengabaikan peraturan.

Terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan (X5) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar -0,152 dan nilai

signifikan sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H5 diterima. Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintahan dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, di mana atasan menempatkan bawahan sesuai latar belakang pendidikannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

Tidak terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum (X6) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,008 dan nilai signifikan sebesar 0,914 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H6 ditolak. Artinya bahwa semakin tinggi persepsi penegakan hukum di pemerintahan atau semakin baik penegakan hukum di pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penutup

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa para pegawai di instansi pemerintahan kabupaten Jember mempersepsikan terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kompensasi terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap *fraud* dan tidak terdapat pengaruh negatif antara kultur organisasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap *fraud*. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode pengumpulan data yang lebih akurat atau seperti wawancara langsung kepada responden, sehingga responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan.

Daftar Pustaka

- Afsari, Siti Fitriani. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan (Studi pada SKPD di Kabupaten Jember)*. Jember: Universitas Jember.
- Arifin, Johan. 2000. *Korupsi dan Upaya*

Pemberantasannya Melalui Strategi di Bidang Auditing. Media Akuntansi No. 13/Th.VII/September.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cressey, Donald R. 1973. *Other People's Money*. Montclair: Patterson Smith.
- Meliana, 2009. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Makassar: Universitas Atma Jaya Makassar.
- Mustika, Dian, dkk. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Pramudita, Aditya. 2013. *Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sukanto, E. 2009. *Perbandingan Persepsi Auditor Internal, Akuntan Publik dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan Fraud Audit dan Profil Fraud Auditor*. Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, 13-26.
- Sulistiyowati, Firma. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Wilopo. 2008. *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan*. Jurnal Ventura Volume 11 no. 1 April 2008.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. 2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.